



KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian menegaskan komitmennya untuk membangun kepercayaan publik, mewujudkan pemerintahan yang transparan, serta mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme;
- b. bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, publik menuntut adanya kepastian mengenai jenis informasi yang dapat diakses, dibatasi, maupun dikecualikan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan terhadap informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, PPID memiliki tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);
 8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KEDUA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 April 2026

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKUASAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2026

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
BIRO PERENCANAAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT								
BERKALA								
1.	Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan dan diumumkan melalui JDIH	Subbagian Hukum dan TU Birorenhukmas	Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Setiap Tahun	✓	✓	✓	Setiap saat (online) 2 tahun (hardfile)
2.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2026	✓	✓		5 tahun
3.	Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2026	✓	✓		5 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
4.	Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2026	Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2026	✓	✓		1 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
5.	Ringkasan DIPA BNPT TA 2026	Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2026	✓		✓	4 Tahun
6.	RKA KL BNPT TA 2026	Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2026	✓		✓	4 Tahun
7.	Tahapan perumusan peraturan yang dibentuk	Subbagian Hukum dan TU Birorenhukmas	Kepala Bagian Hukum, Humas dan TI	Bogor, 2026	✓	✓		2 Tahun
8.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan BNPT RI	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2023			✓	5 tahun
9.	Daftar Informasi Publik	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2026	✓	✓	✓	2 tahun
BIRO UMUM								
BERKALA								
1.	Informasi tentang penerimaan calon pegawai	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Sekretariat Utama	Kepala Biro Umum	Setiap ada pembukaan penerimaan calon pegawai			✓	2 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
2.	Informasi tentang hasil seleksi calon pegawai	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Sekretariat Utama	Kepala Biro Umum	Setiap ada pembukaan penerimaan calon pegawai			✓	2 tahun
3.	Laporan Keuangan <i>Audited</i> TA 2025	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Tahunan (setelah hasil audit diterima dari BPK) di Bogor Tahun 2025	✓	✓		10 tahun
4.	Laporan Realisasi Anggaran per Semester pada Tahun Berjalan	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Setiap Semester pada Tahun Berjalan	✓	✓		6 bulan
5.	Informasi mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) BNPT	PA/KPA dan PPK	PA/KPA dan PPK	Tahun anggaran berjalan BNPT			✓	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
6.	Informasi Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	PPK pada masing-masing Unit Organisasi dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	PPK pada masing-masing Unit Organisasi dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
7.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai	PPK pada masing-masing unit organisasi	PPK pada masing-masing unit organisasi	Tahun anggaran berjalan BNPT			✓	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
								tahun (inaktif) → kemudian musnah
8.	Informasi Jenis Kontrak (Rancangan surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak (SSUK), dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)	PPK pada masing-masing unit organisasi	PPK pada masing-masing unit organisasi	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
9.	Informasi Persyaratan Penyedia Barang/Jasa (Syarat kualifikasi administrasi/legalitas untuk penyedia Badan Usaha/perorangan, dan syarat kualifikasi teknis penyedia	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
10.	Informasi Persyaratan Proses Pemilihan Barang/Jasa	PPK pada masing-masing unit organisasi	PPK pada masing-masing unit organisasi	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
11.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	PPK pada masing-masing unit organisasi	PPK pada masing-masing unit organisasi	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
12.	Informasi harga penawaran penyedia	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT			✓	musnah 2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
13.	Informasi harga hasil negosiasi dengan Penyedia	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
14.	Informasi perihal pemenang pengadaan barang/jasa pemerintah	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
15.	Informasi perihal hasil pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
16.	Ringkasan Kontrak Barang/Jasa	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun anggaran berjalan BNPT	✓			2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
TERSEDIA SETIAP SAAT								
17.	Profil Singkat Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Sekretariat Utama	Kepala Biro Umum	Bogor, 2026	✓	✓		2 tahun
18.	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahunan T.A. 2025	Biro Umum, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris Utama selaku pengguna barang	Setiap awal bulan Januari tahun berikutnya	✓	✓		2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai + 3 tahun (inaktif) → kemudian musnah
19.	Panduan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia	Biro Umum	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Bogor, 2025	✓			Berlaku sampai dengan adanya perubahan
INSPEKTORAT								
TERSEDIA SETIAP SAAT								
1.	Alur Pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Inspektorat	Inspektorat	Bogor, 2026	✓			Berlaku sampai dengan adanya perubahan

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
DIREKTORAT PENCEGAHAN								
BERKALA								
1.	Struktur Organisasi Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Bogor, 2025	✓		✓	Selama berlaku
2.	Hasil Nasional Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
3.	Hasil Nasional Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2025	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
4.	Jurnal Jalan Damai	Subdit Kontra Propaganda	Diretorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		3 tahun
5.	Policy Brief Peta Narasi dan Pola Propaganda 2024	Subdit Kontra Propaganda	Diretorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		3 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
6.	Dokumentasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Direktorat Pencegahan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Bogor, 2025		✓	✓	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan
7.	Modul Pencegahan Terorisme di Indonesia	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Jakarta, 2018		✓	✓	2 Tahun setelah diperbaharui
8.	Hasil Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2025 per Kabupaten/Kota	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2023	✓			2 Tahun setelah diperbaharui
9.	Hasil Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 per Provinsi	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓			2 Tahun setelah diperbaharui

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
10.	Modul Sekolah Damai	Subdit Kontra Propaganda	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓	✓		5 tahun
DIREKTORAT PERLINDUNGAN								
BERKALA								
1.	Informasi yang dipublikasikan dalam media sosial instagram @forsitasbnptri	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2026			✓	4 tahun
2.	Struktur organisasi Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2026	✓			Selama berlaku
3.	Alur Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register Perkara: 103/PUU- XXI/2023 bagi Warga Negara Indonesia Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 103/PUU- XXI/2023
4.	Materi Sosialisasi Layanan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2025	✓		✓	Selama berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 103/PUU- XXI/2023
TERSEDIA SETIAP SAAT								
5.	Maklumat Pelayanan Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT - Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2022		✓	✓	5 tahun
6.	Kumpulan SOP Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban	Bogor, 2022-2025		✓		Selama berlaku

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
			Aksi Terorisme					
7.	Jadwal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem Pengamanan	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2026		✓		1 Tahun Berjalan
8.	Informasi Objek yang sudah dilakukan Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem Pengamanan	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2026		✓		1 Tahun Berjalan
9.	Jadwal Kegiatan Audit Sistem Pengamanan Objek Vital yang Strategis Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2026		✓		1 Tahun Berjalan
10.	Informasi Objek yang sudah dilakukan Audit Sistem Pengamanan Objek Vital yang Strategis Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2026		✓		1 Tahun Berjalan
11.	Struktu Organisasi Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2026		✓		1 Tahun Berjalan
DIREKTORAT DERADIKALISASI								
BERKALA								
1.	Kegiatan dan Program Subdirektorat Bina Dalam Lapas	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2026	✓	✓	✓	Selama berlaku
TERSEDIA SETIAP SAAT								

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Subdirektorat Bina Dalam Lapas	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2026	✓	✓	✓	Selama berlaku
DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAMPUAN								
BERKALA								
1.	Laporan Survei Pengukuran Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah (IKAP) T.A. 2025	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2025	✓	✓		2 Tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
2.	Buku Saku Pedoman Praktis Deteksi dan Cegah Dini Potensi Terorisme di Kelurahan/Desa Tahun 2022	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2022	✓	✓		5 Tahun
3.	Modul Pelatihan Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat serta Pelaporan Konten Radikal bagi Aparatur Pemerintah Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun
4.	Modul Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme KBRNE Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun
5.	Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan / Desa Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional	Direktorat Pembinaan	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
		Pengembangan Sistem Operasi	Kemampuan					
6.	Pedoman Pelatihan Aparat Tiga Pilar dalam Melakukan Pencegahan Radikal Terorisme	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Direktorat Pembinaan Kemampuan	Bogor, 2024	✓	✓		5 Tahun
DIREKTORAT REGIONAL DAN MULTILATERAL								
BERKALA								
1.	Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral a. Tugas dan Fungsi b. Struktur organisasi c. Nama program dan kegiatan d. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	2 tahun
2.	Ringkasan informasi tentang kinerja Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral a. Laporan kinerja Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral Tahun 2025 b. Laporan Sekretariat Bersama RAN PE mengenai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	5 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025							
SERTA MERTA								
3.	Informasi terkait penanganan isu darurat yang berkaitan dengan kerja sama regional dan multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	2 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
4.	Informasi tentang perencanaan Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral a. Rencana Strategis Tahun 2025-2026 b. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	2 tahun
5.	Daftar produk pengetahuan BNPT yang tersedia di platform I-KHub a. Tren Terorisme Indonesia Tahun 2023-2025 b. I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2024 c. Peta Narasi dan Pola Propaganda Radikal Terorisme di Media Sosial	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	5 tahun
6.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam kegiatan yang bersifat tidak rahasia dan terbuka untuk umum	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	2 tahun
7.	Informasi lainnya di lingkungan BNPT berdasarkan persetujuan pimpinan PPID	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2026			✓	2 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
DIREKTORAT PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL								
BERKALA								
1.	Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan Direktorat Perangkat Hukum Internasional a. nama program dan kegiatan b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi c. target atau capaian program dan kegiatan d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2026		✓	✓	2 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
2.	Asesmen terhadap 10 Konvensi dan Protokol Internasional tentang Penanggulangan Terorisme	Kelompok Jabatan Fungsional Konvensi dan Resolusi Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2019		✓	✓	5 tahun
3.	Pamflet Pencegahan Terorisme	Sub Direktorat Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2026		✓	✓	2 tahun

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO